

KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (DKPPP) DALAM PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN BALANGAN

Sugianor¹, Gusti Muhammad Hidayatullah², Umi Nafisah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: uminafisah999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam mengendalikan sumber daya perikanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja DKPPP sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal kepastian kerja, kepuasan masyarakat, kompetensi pegawai, prioritas layanan, pelaksanaan SOP, tanggapan terhadap tugas, serta koordinasi pengawasan dengan kelompok masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana pendukung, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perikanan. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan SDM, penguatan sarana prasarana, serta intensifikasi sosialisasi dan pembinaan. Disarankan agar DKPPP memperketat pengawasan dan meningkatkan kesadaran pegawai dan masyarakat dalam menjaga ekosistem perikanan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja pegawai, sumber daya perikanan, pengawasan, DKPPP Balangan

ABSTRACT

This study explores the performance of the Food Security, Agriculture, and Fisheries Service (DKPPP) of Balangan Regency in controlling fisheries resources and examines the influencing factors. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, observation, and documentation with purposively selected informants totaling eleven individuals. The findings reveal that while several indicators such as service certainty, employee competence, public satisfaction, and adherence to Standard Operating Procedures (SOP) are being fulfilled, significant challenges remain. These include insufficient human resources, limited facilities, weak coordination between agencies and community groups, and low public awareness regarding sustainable fishing practices. Inhibiting factors include budget constraints, lack of personnel in the field, and inadequate infrastructure. Efforts to address these challenges involve enhancing human resource capacity, improving facilities, conducting routine public education, and strengthening collaboration with local stakeholders. To further improve performance, it is recommended that DKPPP leadership enforce SOP compliance, promote responsibility among employees and fish farmers, and support community-based fishery production initiatives.

Keywords: fisheries resource control, public service, employee performance, DKPPP Balangan

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu lembaga tidak dapat dilepaskan dari peran aktif para pegawainya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Pegawai yang menunjukkan kinerja optimal akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam aspek pelayanan publik. Prinsip ini juga berlaku bagi instansi pemerintah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), yang memikul tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sektor perikanan sendiri memiliki peran strategis

dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya protein hewani, serta menjadi salah satu pilar penopang ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Balangan. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan berjalan sesuai regulasi dan prinsip keberlanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah tantangan yang menghambat pengendalian sumber daya perikanan secara optimal. Kurangnya tenaga pengawas yang terlibat dalam pencegahan praktik illegal fishing, minimnya koordinasi antara dinas terkait dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), serta terbatasnya sosialisasi peraturan mengenai pelestarian ekosistem perairan menjadi isu utama yang belum terselesaikan secara efektif. Perilaku masyarakat yang masih menjual ikan belum layak konsumsi juga menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran terhadap regulasi yang berlaku.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang menekankan pada prinsip kualitas serta akuntabilitas. Dalam hal ini, Dwiyanto sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2017), menjelaskan bahwa kinerja organisasi sektor publik dapat dievaluasi melalui lima indikator pokok, yakni produktivitas, kualitas pelayanan, tingkat respons terhadap kebutuhan masyarakat (responsivitas), tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas (responsibilitas), serta transparansi dan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas). Sementara itu, Siregar (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa faktor pengawasan serta edukasi terhadap masyarakat merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan sistem perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Balangan, upaya pengelolaan sumber daya perikanan telah memperoleh dasar hukum yang cukup kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2017 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008. Meskipun regulasi sudah tersedia dan telah disosialisasikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran, seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang berpotensi merusak ekosistem serta aktivitas perdagangan benih atau anak ikan secara ilegal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan melalui pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja DKPPP dalam mengendalikan sumber daya perikanan di Kabupaten Balangan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilakukan di lingkungan kerja DKPPP Kabupaten Balangan, khususnya pada bagian yang membidangi sektor perikanan. Fokus penelitian mencakup persoalan seperti terbatasnya jumlah petugas di lapangan untuk mengawasi praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan, kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas), serta minimnya intensitas penyuluhan kepada warga tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sektor perikanan. Jumlah informan sebanyak sebelas orang yang terdiri dari pejabat teknis DKPPP, pegawai lapangan, anggota kelompok pengawas masyarakat, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi perikanan. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pengawasan, pelayanan, dan koordinasi yang dilaksanakan oleh dinas. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, seperti laporan kegiatan, arsip dinas, dan dokumen peraturan perikanan daerah.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Data yang diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan diringkas guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif agar mampu menggambarkan permasalahan secara menyeluruh. Tahapan akhir adalah penarikan simpulan dan verifikasi, untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan yang muncul dari temuan lapangan. Demi menjaga keabsahan dan keandalan data, peneliti melakukan berbagai teknik seperti memperpanjang waktu observasi, meningkatkan ketelitian dalam proses pengumpulan data, menggunakan triangulasi sumber maupun metode, serta melakukan pengecekan ulang data kepada informan melalui metode member check. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya di wilayah Kabupaten Balangan.

PEMBAHASAN

A. Kinerja Bidang Perikanan dalam Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Pada Pengendalian Sumber Daya Perikanan

1. *Produktivitas*

Konsep produktivitas tidak hanya berkaitan dengan efisiensi semata, tetapi juga mencakup aspek efektivitas. Umumnya, produktivitas dipahami sebagai perbandingan antara input dan output. Namun, pengertian ini dianggap terlalu terbatas. Oleh karena itu, General Accounting Office (GAO) mengembangkan ukuran produktivitas yang lebih komprehensif, dengan memasukkan sejauh mana pelayanan publik dapat mencapai hasil yang diharapkan sebagai bagian dari indikator kinerja yang signifikan.

a. *Efisiensi*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan pada bidang perikanan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan pemanfaatan sarana budidaya seperti kolam dengan sistem aerasi. Namun demikian, efisiensi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pelayanan di beberapa wilayah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pemerataan fasilitas, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar efisiensi kinerja dapat lebih optimal.

b. *Input*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan pada bidang perikanan telah berjalan cukup baik, khususnya dalam upaya pengendalian sumber daya perikanan. Meskipun berbagai program sudah dijalankan dan didukung dengan sarana serta edukasi kepada masyarakat, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana pendukung seperti perahu dan alat penerangan, serta belum meratanya distribusi bantuan dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas input dan pemerataan layanan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.

c. *Output*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam upaya pengendalian sumber daya perikanan menunjukkan hasil

yang cukup positif. Hal ini tercermin dari peningkatan hasil produksi perikanan, terlaksananya kegiatan sosialisasi, serta keterlibatan masyarakat dalam usaha budidaya. Meski demikian, masih dijumpai beberapa hambatan seperti terbatasnya jumlah personel, kurangnya fasilitas pendukung, dan rendahnya kesadaran sebagian warga dalam menjaga ekosistem perairan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan dari sisi input dan peningkatan sistem pengawasan agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal dan merata.

2. Kualitas Layanan

Sumber utama dalam menilai kualitas layanan berasal dari para pengguna jasa atau masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menggambarkan kinerja suatu organisasi publik. Berbagai persepsi negatif terhadap lembaga pelayanan publik kerap muncul akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

a. Kepastian Tingkat Kerja

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kepastian tingkat kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan telah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku, yang dibuktikan melalui kegiatan lapangan yang terjadwal, adanya dokumentasi kegiatan, serta kesaksian masyarakat yang merasakan kehadiran dan dampak pelayanan tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan informasi dan perhatian kepada kelompok masyarakat tertentu seperti pedagang ikan harian.

b. Kepuasan/Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan atau tanggapan masyarakat terhadap kinerja DKPPP di bidang perikanan tergolong baik. Hal ini disebabkan oleh petugas DKPPP yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan larangan illegal fishing kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

3. *Responsivitas*

Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk menyusun prioritas pelayanan, serta pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Kemampuan Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai DKPPP Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan sudah cukup baik. Pegawai memiliki kompetensi sesuai bidangnya, aktif dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan intensitas kehadiran langsung di lapangan untuk menjangkau masyarakat secara lebih merata.

b. Priotas Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa prioritas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan telah berjalan dengan baik. DKPPP memberikan perhatian khusus kepada pembudidaya ikan, kelompok nelayan, dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bantuan sarana, serta kerja sama lintas instansi untuk menekan praktik illegal fishing. Meskipun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak secara langsung, upaya yang dilakukan menunjukkan arah prioritas pelayanan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan tujuan organisasi.

c. Program-Program Pelayanan

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa program pelayanan pada kinerja DKPPP telah berjalan dengan cukup baik dan menysasar langsung kepada kelompok masyarakat yang berperan penting dalam pengawasan sumber daya perikanan.

4. *Responsibilitas*

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Hal ini dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur organisasi dan ketentuan-ketentuan dalam organisasi.

a. Tanggapan Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tanggapan pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan sudah cukup baik. Pegawai dinilai responsif, melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta aktif dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penegakan aturan terhadap praktik illegal fishing. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi kegiatan lapangan yang menunjukkan

keterlibatan pegawai dalam berbagai program penyuluhan dan kerja sama lintas instansi, serta minimnya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

b. Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) di Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan sudah cukup baik. Masyarakat menunjukkan dukungan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, budidaya ikan, serta kepedulian terhadap kelestarian perairan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem perikanan semakin meningkat, meskipun masih diperlukan peningkatan penyuluhan di beberapa wilayah yang belum terjangkau secara maksimal.

5. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas publik merujuk pada sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik dikendalikan oleh pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat atau pegawai yang dipilih kepada masyarakat luas. Pada dasarnya, konsep akuntabilitas publik digunakan untuk menilai sejauh mana program dan tindakan organisasi publik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja lembaga publik tidak cukup hanya diukur melalui indikator internal, seperti capaian target, tetapi juga perlu dievaluasi berdasarkan indikator eksternal yang mencerminkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

a. Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam kinerja DKPPP pada bidang perikanan telah berjalan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan petugas sesuai dengan tanggung jawab dan pekerjaan mereka.

b. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam kinerja DKPPP pada bidang perikanan sudah cukup baik. Petugas telah bekerja sama dengan pihak POKMASWAS untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap praktik illegal fishing.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) di Kabupaten Balangan dalam Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Faktor-faktor yang menghambat kinerja adalah hal-hal yang terjadi diluar ketentuan prosedur kerja atau sesuatu yang terjadi diluar kendala kerja, hingga hal-hal tersebut dapat menghambat terlaksananya kelancaran suatu pekerjaan dan membuat hasil kerja tidak optimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) di Kabupaten Balangan dalam Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan secara langsung di lapangan, ditemukan bahwa keberadaan dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengendalian sumber daya perikanan di Kabupaten Balangan masih belum optimal. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah tidak meratanya penempatan petugas di setiap kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang sama sekali belum memiliki tenaga pengawas atau petugas pemantauan, sehingga proses pengendalian terhadap kegiatan perikanan tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi lemahnya pengawasan adalah kegagalan dalam aspek input, yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari aspek keahlian teknis. Kurangnya tenaga pelaksana di lapangan menyebabkan hambatan serius dalam pelaksanaan tugas monitoring serta pembinaan kepada masyarakat perikanan. Kinerja organisasi menjadi tidak efisien karena beban kerja tidak terbagi secara merata dan koordinasi antarwilayah menjadi lemah.

Masalah ini mengindikasikan perlunya perencanaan strategis yang lebih matang dalam penempatan SDM agar seluruh wilayah, terutama kecamatan-kecamatan yang belum memiliki petugas, dapat terlayani dengan baik dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Perairan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam mendukung pengendalian sumber daya perikanan masih belum optimal. Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan setempat.

Kekurangan dana tersebut berdampak langsung pada ketersediaan sarana teknis di lapangan, seperti minimnya jumlah perahu patroli yang dapat digunakan oleh petugas dalam melakukan pengawasan secara rutin di berbagai titik strategis perairan. Selain itu, petugas pengawas juga menghadapi keterbatasan dalam hal ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, yang seharusnya digunakan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan selama bertugas di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan

fasilitas operasional menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal alokasi anggaran serta penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan sarana dan prasarana, guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Balangan.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pada Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKPPP) Di Kabupaten Balangan Dalam Pengendalian Sumberdaya Perikanan

Berbagai langkah telah dilakukan guna mengatasi hambatan yang memengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya perikanan. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menambah Sumber Daya Manusia Dilapangan Untuk Mengoptimalkan Input

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kualitas kinerja suatu organisasi, termasuk dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Balangan. Keberadaan SDM yang kompeten dan profesional menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya perikanan.

Dinas Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menyesuaikan layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program yang dijalankan, tetapi juga untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan. Dengan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan warga serta dukungan dari SDM yang berkualitas, maka diharapkan pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di daerah tersebut.

2. Menambah Sarana dan Prasarana di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meminimalisasi praktik illegal fishing, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta personil yang cukup. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah penambahan unit perahu operasional yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan secara berkala. Selain itu, keberadaan petugas yang terlatih dan jumlah personil yang mencukupi sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan secara optimal. Kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta memperkuat sistem pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

3. Melakukan Sosialisasi Secara Rutin Kepada Masyarakat Pentingnya Menjaga Kelestarian

Sumber Daya Perikanan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Kabupaten Balangan, ditemukan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem perikanan, khususnya ekosistem ikan di perairan setempat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga masih ditemukan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan atau yang tergolong sebagai illegal fishing. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Sosialisasi ini perlu menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama para nelayan, agar mereka mengetahui dampak negatif dari penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan serta memahami aturan yang berlaku. Selain edukasi, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar juga harus dilaksanakan secara konsisten untuk menimbulkan efek jera. Jika kesadaran masyarakat tidak segera ditingkatkan dan pengawasan tidak diperketat, maka akan sulit untuk mencapai target produksi ikan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan dalam pengendalian sumber daya perikanan belum sepenuhnya optimal. Dari berbagai indikator yang dianalisis, diketahui bahwa beberapa aspek telah berjalan dengan baik, seperti kepastian kerja, kepuasan masyarakat, kompetensi pegawai, prioritas pelayanan, kesesuaian program dengan SOP, respon pegawai terhadap target kerja, serta tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan bersama kelompok masyarakat. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan, khususnya dalam aspek efisiensi pelaksanaan tugas, ketersediaan sarana pengawasan di perairan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Faktor-faktor penghambat kinerja DKPPP dalam pengendalian sumber daya perikanan antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di lapangan, minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah, serta kurangnya dukungan sarana eksternal yang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan juga masih rendah, yang ditunjukkan oleh praktik penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan. Kelemahan-kelemahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Adapun upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh DKPPP meliputi penguatan kapasitas

sumber daya manusia, peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana pengawasan seperti penambahan perahu operasional, serta pelaksanaan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian sumber daya perikanan. Sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati perairan, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 283-295.
- Agung Budi. S. (2017). Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Agus, A. (2018). Pengelolaan dan penggunaan sumberdaya kelautan/perikanan (studi kasus Kota Ternate, Maluku Utara). *Journal of Fisheries and Marine Science*, 1(2), 93-103.
- Anonim._ RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2025
- Bintoro, R., & Daryanto, A. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budihardjo. (2017). *Manajemen Kinerja Karyawan*. Jakarta: Erlangga.
- Budi Agung. 2017. Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Kabupaten Situbondou Perikanan.
- Dwiyanto, A. (dalam Pasolong, H.). (2017). *Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, W. W. (2018). *Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir Dan Laut (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)*.
- Rudyanto, T., Suroso, I., & SULISTIYO, A. B. (2017). Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Tim Penyusun, 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.